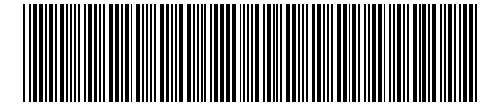




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.649029/2020**



DS:5705-0673-9000-1142

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (28) | MALUKU UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (649029) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA |
| Sebesar | : Rp. 940.841.000 | (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	940.841.000
Rp.	940.841.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 940.841.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN T E R N A T E | (062) Rp. | 940.841.000 |
|-----------------------|-----------|-------------|

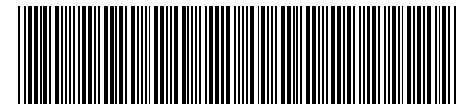
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5705-0673-9000-1142

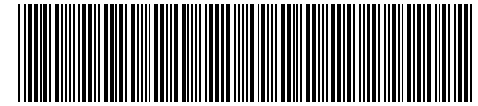
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : RAMLI HS, SE.,M.AP
Bendahara Pengeluaran : MUNAWAR WAHID
Pejabat Penanda Tangan SPM : RIFQI ADRIAN KRISWANTO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			940.841.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			940.841.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			940.841.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			940.841.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : RAMLI HS, SE.,M.AP
Bendahara Pengeluaran : MUNAWAR WAHID
Pejabat Penanda Tangan SPM : RIFQI ADRIAN KRISWANTO

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	63 Orang		504.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00	Orang	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	7 Kegiatan		74.690.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		48.151.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		160.000.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		77.000.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah		77.000.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

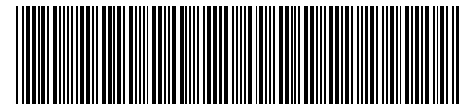
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020

I B. SUMBER DANA



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

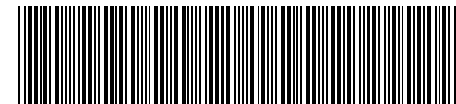
		Rp.	940.841.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2020					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			940.841.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

Pagu

Ekuivalen Rupiah

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



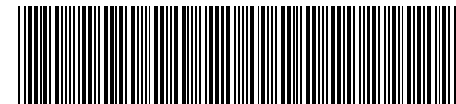
DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	-	940.841	-	-	-	940.841		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	940.841	-	-	-	940.841		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	940.841	-	-	-	940.841		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	504.000	-	-	-	504.000	28 . 51	
01	RM	-	504.000	-	-	-	504.000	062	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	74.690	-	-	-	74.690	28 . 51	
01	RM	-	74.690	-	-	-	74.690	062	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	48.151	-	-	-	48.151	28 . 51	
01	RM	-	48.151	-	-	-	48.151	062	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	160.000	-	-	-	160.000	28 . 51	
01	RM	-	160.000	-	-	-	160.000	062	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	77.000	-	-	-	77.000	28 . 51	
01	RM	-	77.000	-	-	-	77.000	062	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	77.000	-	-	-	77.000	28 . 51	
01	RM	-	77.000	-	-	-	77.000	062	
JUMLAH		-	940.841	-	-	-	940.841		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

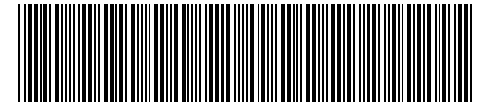
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	61.800	47.800	57.800	92.515	90.359	126.953	128.992	73.589	47.367	108.805	48.600	56.261	940.841
		52 BELANJA BARANG	61.800	47.800	57.800	92.515	90.359	126.953	128.992	73.589	47.367	108.805	48.600	56.261	940.841
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	61.800	47.800	57.800	92.515	90.359	126.953	128.992	73.589	47.367	108.805	48.600	56.261	940.841
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	61.800	47.800	57.800	92.515	90.359	126.953	128.992	73.589	47.367	108.805	48.600	56.261	940.841

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
IV A. B L O K I R**



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

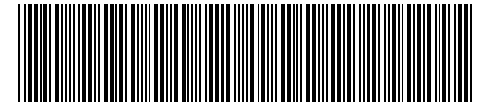
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:5705-0673-9000-1142

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003